

**PENYUSUNAN DAN PENGARSIPAN SURAT KETERANGAN MAGANG
OLEH STAF BAGIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MAGANG
DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BANDUNG**



LAPORAN PRAKTIK KERJA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh predikat Ahli Madya**

Oleh :

Auriezka Nurfenita

5031801040

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT
No. 6885/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2020**

BANDUNG

2021

**INTERNSHIP LETTER ORGANIZING AND ARCHIVING
BY INTERNSHIP SERVICE STAFF
AT THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY
OF BANDUNG CITY**



INTERNSHIP REPORT

**This report is made to fulfill the requirement of the
Diploma III Business Management Program**

**By :
Auriezyka Nurfenita
5031801040**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
DIPLOMA III BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM
Accredited based on the decree of BAN – PT
No. 6885/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2020
BANDUNG
2021**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN



**PENYUSUNAN DAN PENGARSIPAN SURAT
KETERANGAN MAGANG OLEH STAF BAGIAN
PELAYANAN SURAT KETERANGAN MAGANG
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG**

Nama : Auriezyka Nurfenita

NPM : 5031801040

PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA

Bandung, 20 Agustus 2021

Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan

Nina Septina, SP., MM.

Pembimbing

Dr. Elvy Maria Manurung.

Penguji

Dr. Rr. Ida Nuraida, SE., MM.

PERNYATAAN :

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Auriezyka Nurfenita
Tempat , tanggal lahir : Bandung, 28 Februari 2000
Nomor Pokok : 5031801040
Program studi : DIII Manajemen Perusahaan
Jenis naskah *) : ~~Skripsi / laporan kerja / makalah / artikel~~ / laporan praktik kerja

JUDUL (Bahasa Indonesia)

PENYUSUNAN DAN PENGARSIPAN SURAT KETERANGAN MAGANG
OLEH STAF BAGIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN MAGANG
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG

JUDUL (Bahasa Inggris)

INTERNSHIP LETTER ORGANIZING AND ARCHIVING
BY INTERNSHIP SERVICE STAFF
AT THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY
OF BANDUNG CITY

dengan,

Pembimbing : Dr. Elvy Maria Manurung

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal : 30 Juli 2021
Pembuat pernyataan : Auriezyka Nurfenita



(Auriezyka Nurfenita)

*) coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penulis telah melaksanakan praktik kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Penulis telah melakukan praktik kerja selama 344 jam kerja mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021 dan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at selama 8 jam per hari. Adapun bidang yang dilakukan oleh penulis yaitu administrasi pelayanan surat keterangan magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik kerja adalah membuat surat keterangan magang untuk tamu yang datang langsung, membuat surat keterangan magang untuk tamu yang mengajukan secara *online* melalui *Google Form* dan pengarsipan surat keterangan magang. Adapun permasalahan yang penulis hadapi yaitu pemeriksaan dokumen persyaratan dibagian *Front Office* kurang teliti menyebabkan dokumen pemohon yang dibawa ke ruang pelayanan surat tidak dapat diproses dan beberapa pemohon memaksa untuk tetap dibuatkan surat keterangan magang, arsip surat keterangan hanya diurutkan berdasarkan tanggal saja dan terkadang tidak diberi keterangan tanggal sehingga kesulitan dalam mencari arsip surat pemohon yang akan melakukan revisi surat, serta *link Google Form* yang tidak dipisahkan dengan pengajuan surat keterangan lain.

Berdasarkan kegiatan praktik kerja yang telah dilakukan oleh penulis, penulis sudah memahami cara membuat surat untuk pemohon yang datang langsung, cara membuat surat untuk pemohon yang mengajukan secara *online* dan cara mengarsipkan surat keterangan magang. Penulis menyarankan staf Bagian *Front Office* sebaiknya melakukan pengecekan dengan teliti sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, arsip surat dapat diurutkan berdasarkan tanggal dan nama pemohon kemudian diberi keterangan tambahan, selanjutnya *link Google Form* sebaiknya dipisahkan sesuai pengajuan surat keterangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan kesempatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja berjudul “Penyusunan dan Pengarsipan Surat Keterangan Magang oleh staf Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung”. Penyelesaian laporan praktik kerja ini ditujukan untuk mendapat gelar Ahli Madya pada program studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selama melaksanakan praktik kerja, banyak sekali pengalaman dan hal-hal baru yang penulis dapatkan selama menyelesaikan praktik kerja di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan kakak penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja ini dan seluruh keluarga besar penulis yang memberikan dukungan dan juga semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Budiana Gomulia, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Nina Septina, SP., MM. selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. Elvy Maria Manurung, SE., Ak., MT. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahan yang sangat bermanfaat serta membimbing penulis dalam menyusun laporan praktik kerja ini.
4. Ibu Dr. Rr. Ida Nuraida, SE., MM., Ibu Lilian Danil, SE., MM., Bapak Ronny Trian Surbakti, S.IP., MM., Bapak Dianta Hasri Natalius Barus ST., MM., Ibu Intan Megafany SE., MM., Ibu Kurweni Ukar, Dra., Ak., M.Kom., dan seluruh dosen yang sudah mengajari penulis selama

perkuliahan di DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu Leoni Anastasia Guswanti Meliala, A.Md., dan Bapak Asep Tisna selaku bagian administrasi tata usaha DIII Manajemen Perusahaan yang telah membantu penulis dalam hal administratif selama masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan laporan praktik kerja ini.
6. Rizky Ramadhan, Tiffany Valeria, Delvi Lorensia, Syahida Inayatullah, Aulia Dwi Utami, Najelaa Azzahra, Nanda Annisa, Ayu Aulia, Lita Liftiani, Deby Putri Agustina yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam mengerjakan laporan praktik kerja.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam penulisan laporan praktik kerja ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap laporan kerja ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.

Bandung, 31 Juli 2021

Penulis

Auriezyka Nurfenita

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SIMBOL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja.....	1
1.2. Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja.....	1
1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktik	1
1.4. Profil Tempat.....	2
1.4.1. Sejarah Tempat Praktik Kerja.....	3
1.4.2. Struktur Organisasi	6
1.4.3. Kondisi Keuangan.....	10
1.4.4. Kegiatan Usaha	12
1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan.....	13
BAB 2 PEMBAHASAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA.....	16
2.1. Uraian pekerjaan (<i>Job Description</i>)	16
2.2. Proses dan Prosedur Pelaksanaan	16
2.3. Jadwal Pelaksanaan	27
2.4. Relevansi Teori Dengan Praktik.....	37
2.4.1. Membuat Surat Keterangan Magang Untuk Pemohon yang Datang..	38
2.4.2. Membuat Surat Keterangan Magang Untuk Pemohon Yang Mengajukan Secara <i>Online</i> Melalui <i>Google</i>	39
2.4.3. Pengarsipan Surat Keterangan Magang.....	39
2.5. Masalah dalam Praktik Kerja	41
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN.....	43

3.1. Kesimpulan.....	43
3.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

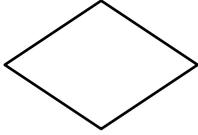
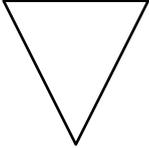
DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. RINGKASAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.....	10
TABEL 1.2. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	14
TABEL 2.1. JAM KERJA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG.....	28
TABEL 2.2. JADWAL KERJA PRAKTIK KERJA	28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. LOGO KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	4
GAMBAR 1.2. RUANG KERJA PENULIS DI BKBP BANDUNG.....	6
GAMBAR 1.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	7
GAMBAR 1.4. BISNIS PROSES BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	13
GAMBAR 2.1. BAGAN PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MAGANG UNTUK PEMOHON YANG DATANG LANGSUNG.....	18
GAMBAR 2.2. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN MAGANG UNTUK ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PEMOHON	19
GAMBAR 2.3. MESIN PENCETAK SURAT KETERANGAN MAGANG	20
GAMBAR 2.4. BAGAN PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MAGANG SECARA <i>ONLINE</i>	22
GAMBAR 2.5. <i>LINK GOOGLE FORM</i> UNTUK PEMOHON YANG MENGAJUKAN SURAT KETERANGAN MAGANG SECARA <i>ONLINE</i>	23
GAMBAR 2.6. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN MAGANG.....	24
GAMBAR 2.7. BAGAN PROSEDUR PENGARSIPAN SURAT KETERANGAN MAGANG	25
GAMBAR 2. 8. MEJA ARSIP SURAT KETERANGAN MAGANG, PENELITIAN DAN SURVEI/WAWANCARA	26
GAMBAR 2.9. ARSIP SURAT KETERANGAN MAGANG	27

DAFTAR SIMBOL

SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Awal/Akhir	Digunakan untuk menyatakan awal dan akhir
	Keputusan	Digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu
	Proses	Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan
	Penyimpanan	Menunjukkan bahwa daya akan disimpan ke media tertentu

Sumber: Ida Nuraida, 2014

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (1)	48
LAMPIRAN 2 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (2)	49
LAMPIRAN 3 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (3)	50
LAMPIRAN 4 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (4)	51
LAMPIRAN 5 FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (5)	52
LAMPIRAN 6 PENILAIAN PRAKTIK KERJA	53
LAMPIRAN 7 SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG	54
LAMPIRAN 8 LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja

Praktik kerja dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung atau jika disingkat menjadi Bakesbangpol. Kantor tersebut berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Penulis bekerja sebagai staf Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang. Praktik kerja dijalankan selama 344 jam atau kurang lebih 43 hari kerja, terhitung dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021. Jam kerja yang ditetapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB dalam sehari.

1.2. Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja

Penulis melaksanakan praktik kerja di bidang administrasi pelayanan surat keterangan magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Bidang tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan oleh penulis yaitu staf Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Staf Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang adalah posisi yang ditempatkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Tugas yang diberikan yaitu (i) membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang datang langsung, (ii) membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang mengajukan secara *online* melalui *Google Form*, (iii) pengarsipan surat keterangan magang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja

Adapun beberapa tujuan dari praktik kerja yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami cara membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang datang langsung.

2. Untuk memahami cara membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang mengajukan secara *online* melalui *Google Form*.
3. Untuk memahami cara pengarsipan surat keterangan magang.
Kegunaan praktik kerja selama penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :
 1. Bagi penulis
 - a. Umum : Pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat untuk melatih dan mengasah keterampilan sebelum melepas status Mahasiswa.
 - b. Khusus : Bermanfaat untuk membentuk mental, pengetahuan serta pengalaman mengenai pekerjaan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
 2. Bagi perusahaan
Hasil praktik kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan serta mendapatkan ide-ide baru berdasarkan sudut pandang dari luar perusahaan.
 3. Bagi pembaca
Praktik kerja ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi sehingga berguna untuk menambah wawasan khususnya mengenai administrasi.

1.4. Profil Tempat Bekerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah badan pemerintahan yang bergerak di bidang politik. Memiliki 4 bidang yaitu Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas, dan Bidang Kewaspadaan Nasional.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang lingkup kesatuan bangsa dan politik.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4.1. Sejarah Tempat Praktik Kerja

Sebelum namanya berganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, dahulu disebut dengan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPPM) Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Merupakan sebuah lembaga teknis yang dibentuk sebagaimana amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten. BKBPPM kemudian melakukan perubahan nama kedua menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah BKBPM Kota Bandung juga telah mempunyai tugas pokok, fungsi, serta uraian tugas berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa urusan wajib bidang pemerintahan salah satunya ada pada huruf (s) yakni: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, serta huruf (u): pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan wajib tersebut menjadi tugas pokok

dan fungsi bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung BKBPM berubah nama menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari tiga bidang yaitu: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas, dan Bidang Kewaspadaan Nasional.

Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

GAMBAR 1.1.
LOGO KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2021

Lambang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diizinkan oleh Keputusan Presiden pada tanggal 28 April 1953 Nomor 104, kemudian ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung pada tanggal 8 Juni 1953. Selanjutnya diundangkan dalam Berita Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 Nomor 4 lampiran Nomor 6, lambang tersebut bertokoh perisai yang berbentuk jantung. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah blok lintang mendatar

bertajuk empat buah yang berwarna hitam dengan pelisir berwarna putih (perak) pada pinggir atasnya.

- a. Bagian atas latar kuning (emas) dengan lukisan sebuah gunung berwarna hijau yang bertumpu pada blok lintang. Kuning (emas) berarti kesejahteraan, keluhungan.
- b. Bagian bawah latar putih (perak) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna biru. Putih (perak) berarti kesucian dan biru berarti kesetiaan.
- c. Di bawah perisai itu terlukis sehelai pita berwarna kuning (emas) yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita itu tertulis huruf-huruf besar latin berwarna hitam amsal dalam bahasa kawi, yang berbunyi gemah ripah wibawa mukti. Hitam berarti kokoh, kuat, tegak dan gemah ripah wibawa mukti berarti tanah subur rakyat makmur.
- d. Lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambing yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

Pada Gambar 1.2. di bawah ini, penulis melampirkan gambar ruang kerja penulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

GAMBAR 1.2.
RUANG KERJA PENULIS DI BKBP BANDUNG



Sumber : Penulis, 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut :

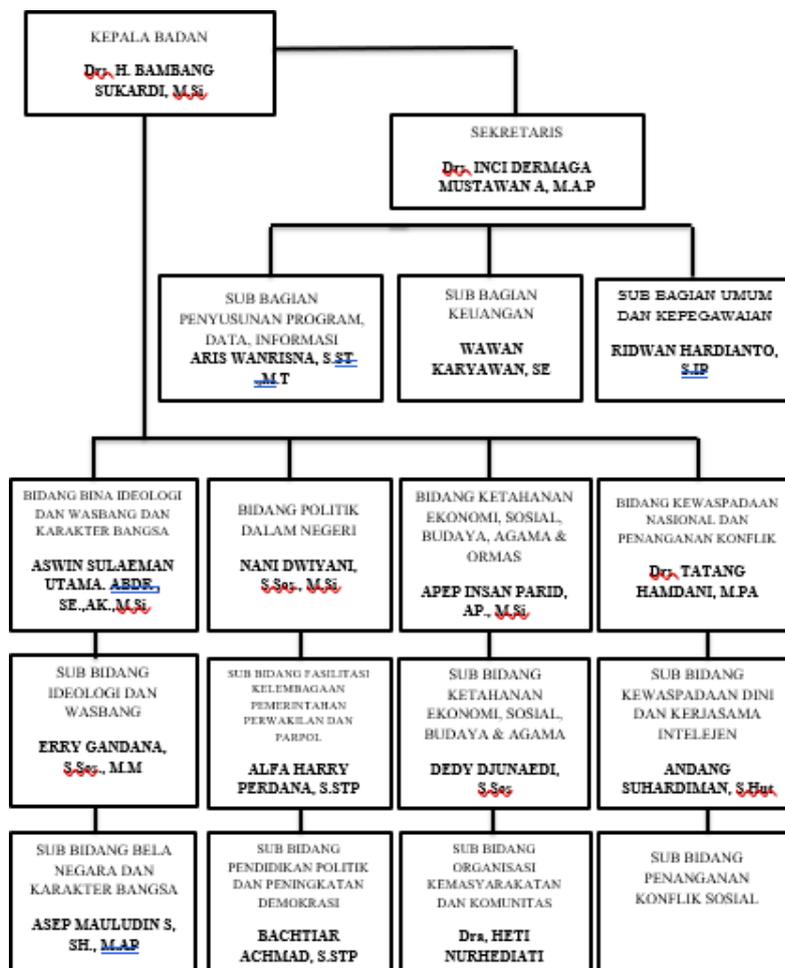
Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Sedangkan misinya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pendidikan politik.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan adalah suatu susunan atau hubungan antara setiap bagian, fungsi maupun posisi individu yang saling bekerja sama dalam sebuah kelompok. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dibagi dalam tiga bagian besar yang saling berhubungan, yang pertama adalah struktur organisasi yang menjelaskan hubungan Kepala Badan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dengan dibantu oleh Sekretaris. Kedua adalah struktur organisasi Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Data dan

Informasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Yang ketiga adalah struktur organisasi Kepala Badan yang membawahi 4 (empat) Bidang dan 8 (delapan) Sub Bidang.

GAMBAR 1.3.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2021

Penulis melakukan praktik kerja sebagai Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung di bawah Sub Bagian Penyusunan Program, Data, dan Informasi. Berikut deskripsi dan penjelasan jabatan staf Bagian Pelayanan Surat Keterangan Magang.

1. Membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang datang langsung.
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang dibawa oleh pemohon
 - 1) Dokumen persyaratan lengkap

Dokumen dinyatakan lengkap jika (i) tujuan surat pengantar dari Universitas ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah benar penulisannya disertai cap dan tanda tangan, (ii) adanya surat pernyataan diterima dari tempat magang yang dituju oleh pemohon, (iii) fotokopi KTP atau KTM, dan (iv) foto berwarna terbaru
 - 2) Dokumen persyaratan kurang lengkap

Dokumen dinyatakan tidak lengkap jika tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah diberikan
 - b. Dokumen yang kurang lengkap tidak dapat diproses dan langsung dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kembali
 - c. Dokumen yang lengkap diberikan formulir data diri untuk diisi
 - d. Membuat surat keterangan magang sesuai formulir data diri dan dokumen persyaratan yang dibawa oleh pemohon
 - e. Mencetak surat keterangan magang, 1 (satu) lembar surat asli untuk arsip disimpan oleh pemohon dan 2 (dua) lembar surat fotokopi untuk diberikan ke tempat tujuan magang serta arsip di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
2. Membuat surat keterangan magang untuk pemohon yang mengajukan secara *online* melalui *Google Form*.
 - a. Membuka *link Google Form* kemudian mencari data pemohon yang akan membuat surat keterangan magang
 - b. Memeriksa dokumen persyaratan yang diunggah oleh pemohon, dokumen dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu dokumen persyaratan yang lengkap dan dokumen persyaratan yang kurang lengkap.
 - 1) Dokumen persyaratan lengkap

Dokumen dinyatakan lengkap jika (i) tujuan surat pengantar dari Universitas ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah benar

penulisannya disertai cap dan tanda tangan, (ii) adanya surat pernyataan diterima dari tempat magang yang dituju oleh pemohon, (iii) fotokopi KTP atau KTM, dan (iv) foto berwarna terbaru

2) Dokumen persyaratan kurang lengkap

Dokumen dinyatakan tidak lengkap jika tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah diberikan

- c. Dokumen yang lengkap langsung dicetak dan segera dibuatkan surat keterangan magang
 - d. Dokumen yang kurang lengkap tidak dapat diproses dan langsung menghubungi pemohon yang bersangkutan melalui *WhatsApp* untuk melengkapi dokumen sesuai persyaratan
 - e. Memastikan surat keterangan magang sudah sesuai dengan data di dokumen pemohon
 - f. Mengirimkan surat keterangan magang melalui *WhatsApp* kepada pemohon yang bersangkutan dan mencetak 1 (satu) lembar surat untuk arsip di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
3. Pengarsipan surat keterangan magang
- a. Mengurutkan surat keterangan magang berdasarkan tanggal paling awal dibuatnya surat
 - b. Melubangi surat-surat keterangan magang untuk dimasukkan ke *ordner*
 - c. Memasukkan surat-surat keterangan magang ke dalam *ordner*
 - d. Menyimpan *ordner* di meja arsip

1.4.3. Kondisi Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

TABEL 1.1.
RINGKASAN APBD KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA BANDUNG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.300.827.453.188
4.1.01	Pajak Daerah	2.700.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	69.286.809.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.885.582.468
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	512.655.061.120
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.255.786.584.793
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.418.235.485.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	837.551.099.793
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	6.580.614.037.981
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	5.677.081.544.918
5.1.01	Belanja Pegawai	2.724.824.499.901
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.552.332.072.172
5.1.04	Belanja Subsidi	79.943.159.300
5.1.05	Belanja Hibah	186.619.678.545
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	133.362.135.000

5.2	BELANJA MODAL	823.450.911.365
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.714.730.674
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.100.385.870
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.769.950.759
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.195.711.990
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.670.132.072
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.473.019.673
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.473.019.673
5.4	BELANJA TRANSFER	33.750.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.750.000.000
	Jumlah Belanja	6.555.755.475.956
	Total Surplus/(Defisit)	24.858.562.025
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.849.185.812
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.849.185.812
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.849.185.812
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	51.707.747.837
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.707.747.837
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	51.707.747.837
	Pembiayaan Netto	(24.858.562.025)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)

Sumber : Lampiran I Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020, 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 jumlah APBD Kota Bandung adalah sebesar Rp 6.607.463.223.793. Kemudian pada lampiran III No. 60 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2020 jumlah APBD Kota Bandung yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebesar Rp 36.622.644.507. Berikut adalah program dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang menggunakan APBD Kota Bandung :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

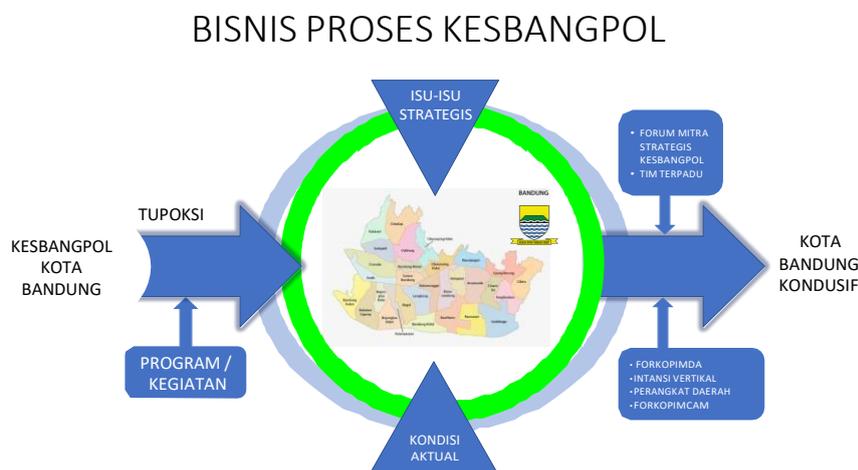
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1.4.4. Kegiatan Usaha

Penurunan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat di Kota Bandung menyebabkan adanya intoleran dan radikalisme. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung kemudian mengumpulkan beberapa isu strategis yang ada di wilayah Kota Bandung. Pada bidang ketertiban dan ketentraman terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang jumlahnya masih relatif tinggi, berdasarkan data dari BNN Kota Bandung pada tahun 2016 terdapat 1278 orang yang menjalani rehabilitasi dan tersebar di 3 (tiga) tempat rehabilitasi. Permasalahan lain di bidang ketertiban dan ketentraman yaitu aksi demo yang tidak terprediksi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat bekerja sama dengan TNI, Polri dan kejaksaan melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Aparatur Pemerintah dan Lintas Sektor Dalam Menjaga Kondusifitas Kota Bandung (Kominda) sehingga dapat mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu). Pada bidang politik, ekonomi dan sosial budaya setiap tahun jumlah Organisasi Masyarakat bertambah maka butuh verifikasi ke lapangan untuk memastikan keberadaan dan mengontrol aktivitas Organisasi Masyarakat sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 40.

Isu-isu strategis yang telah dirangkum tersebut berasal dari bisnis proses yang telah dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pada Gambar 1.4. di bawah ini, penulis melampirkan gambar bisnis proses dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

GAMBAR 1.4.
BISNIS PROSES BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2021

1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Sumber tenaga kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berasal dari internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari promosi jabatan karyawan sedangkan sumber eksternal berasal dari rekrutmen seperti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Syarat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu harus warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana atau dihukum penjara, serta persyaratan lain sesuai dengan jabatan yang dipilih. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung per 18 Maret 2021 jumlah pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berjumlah 48 orang. Pegawai tersebut terdiri dari 36 orang laki-laki dan 12 orang perempuan (<https://bandungkota.bps.go.id>).

Daftar pejabat struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2.
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG

Nama	Satuan Kerja	Unit Kerja	Golongan Pangkat	TMT Golongan	Eselon	Nama Jabatan	TMT Jabatan	Pendidikan
Hentol Akhmad Ferdi Ligaswara,SH, MH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	IV/c	1-Apr-14	II.b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21-Mar-19	S2
Dra.Lusi Susilayani,M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat BKBP	IV/b	1-Apr-13	III.a	Sekretaris BKBP	3-Jan-17	S2
Drs. Inci Dermaga Mustawan A.M.A.P	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas	IV/a	1-Apr-12	III.b	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas	6-Jan-17	S1
Soni Bakhtiyar,S.Sos, M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	IV/a	1-Apr-14	III.b	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	12-Jul-19	S2
Drs.Suherlan,M.Ag	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional - Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial	III/d	1-Apr-19	IV.a	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial	10-Jan-17	S2
Setiati Witarsa,SH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat BKBP - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d	1-Apr-05	IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10-Jan-17	S1
DRA. Heti Nurhediati	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	III/d	1-Oct-05	IV.a	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	10-Jan-17	S1
Asep Mauludin Suhandi,SH,M.A.P	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Sub Bidang Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	IV/a	1-Oct-18	IV.a	Kepala Sub Bidang Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	10-Jan-17	S2

Nama	Satuan Kerja	Unit Kerja	Golongan Pangkat	TMT Golongan	Eselon	Nama Jabatan	TMT Jabatan	Pendidikan
Ery Gandana,S.Sos.,M.M	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Sub Bidang Bina Ideologi	III/d	1-Oct-18	IV.a	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi	10-Jan-17	S2
Dedy Djunaedi,S SOS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Seni Budaya	III/d	1-Oct-05	IV.a	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Seni Budaya	30-Jul-19	S1
Nani Dwiyani,S.Sos.,M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional - Sub Bidang Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	IV/a	1-Oct-13	IV.a	Kepala Sub Bidang Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	10-Jan-17	S2
Ridwan Hardianto,S.IP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Kewaspadaan Nasional - Sub Bidang Kewaspadaan Dini	III/c	1-Apr-16	IV.a	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini	14-Feb-18	S1
Leonard,S.STP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas - Sub Bidang Politik Dalam Negeri	III/c	1-Apr-17	IV.a	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	30-Jul-19	D4
Alfa Harry Perdana,SSTP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	III/d	1-Apr-15	IV.a	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	23-Mar-17	D4

Sumber : <http://data.bandung.go.id>, 2021